

ABSTRAK

Salah satu bentuk implementasi kesehatan lingkungan adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 67 Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah tercemarnya lingkungan laut yaitu di wilayah Muncar, Banyuwangi. Hal ini sangat berdampak pada jumlah hasil tangkapan ikan yang setiap tahunnya menurun drastis, sungai-sungai yang berbau menyengat sampai ke pemukiman warga, dan menguningnya air sumur yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kini sudah tidak layak dikonsumsi. Namun tidak ada upaya yang jelas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan sanksi baik secara administrasi maupun pidana kepada para pengusaha pabrik pengolahan ikan yang membuang limbah hasil industrinya secara sembarangan melalui selokan yang menuju ke sungai serta mengarah ke pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah baku mutu air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Pada Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah baku mutu air berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan kunjungan keliling ke sungai-sungai yang ada di kawasan Muncar untuk melihat pabrik-pabrik yang ada disekitar sungai apakah telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada apabila ditemukan pabrik yang tidak mematuhi peraturan maka akan langsung diberikan sanksi. Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup juga berupa kegiatan pengawasan dan pembinaan kunjungan kelengkapan, pemberian surat kepada perusahaan, setiap tahun melakukan sosialisasi kepada perusahaan.

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah, Limbah Pabrik, Peraturan Daerah

ABSTRAC

One form of implementing environmental health is the issuance and enactment of Law Number 32 of 2009, Article 67 of the Law on Environmental Protection and Management, which states that: Everyone is obliged to preserve the function of the environment and control environmental pollution and /or damage. . One of the environmental problems is pollution of the marine environment, especially in the Muncar area, Banyuwangi. This has a big impact on the number of fish catches which decrease drastically every year, the strong-smelling rivers have reached residential areas, and the yellowing of the well water used by residents to meet their daily needs is now unfit for consumption. However, there has been no clear effort from the Regional Government of Bayuwangi Regency to impose administrative or criminal sanctions on fish processing factory entrepreneurs who dispose of their industrial waste haphazardly through ditches that lead to rivers and beaches. This research aims to determine and analyze the Banyuwangi Regency Regional Government's policy in monitoring fish factory business activities in the Muncar area regarding the management of waste water quality standards based on Banyuwangi Regency Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Water Pollution Control. The results and discussion of this research are the Banyuwangi Regency Regional Government Policy regarding supervision of fish factory business activities in the Muncar area regarding waste management for water quality standards based on Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Water Pollution Control implemented by the Banyuwangi Regency Government through the Environmental Service by visiting rivers. river in the Muncar area to see whether the factories around the river have complied with existing laws and regulations. If a factory is found that does not comply with the rules, it will immediately provide testimony. Other efforts carried out by the Environmental Service also include monitoring and coaching field visits, providing letters to companies, and conducting outreach to companies every year.

Keywords: Government Supervision, Factory Waste, Regional Regulations